

MENGHIDUPKAN KEMBALI SPIRIT POLITIK ILMU PEMERINTAHAN

Mohamad Firdaus

Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

Email: Mohamadfirdaus11@gmail.com

ABSTRAK

Ilmu pemerintahan pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari ilmu politik, dimana dalam seberapa aspek dari ilmu pemerintahan seperti teori, metode dan metodologi tidak jauh berbeda dengan ilmu politik. Tulisan ini mencoba menjelaskan dan menjabarkan hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Sejauh ini ilmu pemerintahan hanya mempelajari birokrasi, administrasi publik, manajemen dan kebijakan publik. Dengan hanya dipamahi sebagai ilmu administrasi membuat ilmu pemerintahan hanya menjadi seperti ilmu perkantoran. Hal tersebut dikarenakan adanya warisan kolonial dan suburnya neoliberalisme. Untuk itu tulisan ini akan mencoba menghidupkan kembali roh ilmu politik ke dalam ilmu pemerintahan yang akan menjelaskan bahwasannya pada realitasnya aspek pemerintahan sangat dipengaruhi oleh aspek politik. Dan memberikan sebuah alternatif baru terhadap eksistensi ilmu pemerintahan yang berbasis untuk memuliakan rakyat.

Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, Realitas Politik, Rakyat

ABSTRACT

Government science is basically the study of political science, where many aspects of government science such as theory, method and methodology are not much different from political science. This paper tries to explain and describe the relationship between government science and political science. So far, the science of government has only studied bureaucracy, public administration, management and public policy. Only understanding it as a science of administration makes government science just like office science. This is due to the colonial heritage and the proliferation of neoliberalism. For this reason, this paper will try to revive the spirit of political science into government science which will explain that in reality, aspects of government are strongly influenced by political aspects. And provide a new alternative to the existence of government science based on honoring the people.

Keywords: Government Science, Political Reality, People.

Informasi Artikel

Diterima: Oktober 2020, **Disetujui:** November 2020, **Dipublikasikan:** Desember 2020

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.85>

Oleh karena itu, haruslah diingat bahwa dalam merebut kekuasaan sebuah negara, sang penguasa haruslah menjalankan rencana jahatnya seketika sehingga dia tidak harus mengulanginya lagi setiap saat, dan sebisa mungkin tidak melakukan perubahan-perubahan, meyakinkan rakyat kembali dan memenangkan suara mereka dengan memberikan keuntungan untuk mereka (Niccolo Machiavelli: Il Principe)

PENDAHULUAN

Selama ini adanya sebuah Ilmu tidak terlepas minimal dari tiga unsur yaitu ilmu harus bersifat sistematis, ilmu harus memiliki unsur obyektifitas, dan memiliki metode ilmiah. Ilmu-ilmu sosial pada kondisi kontemporer saat ini sudah memiliki unsur tersebut. Ilmu sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memiliki dinamika dan pasang surut untuk dapat memahaminya. Perkembangan teori-teori, dalil-dalil dan azas, telah memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam membaca dan menganalisis kondisi masyarakat.

Ilmu Pemerintahan yang merupakan bagian dari ilmu sosial juga mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang khas Indonesia, dan tidak ada di negara lain. Kenapa Ilmu pemerintahan hanya ada di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sutoro Eko (2020) menjelaskan bahwa realitanya di belahan dunia manapun terutama di Amerika Serikat tidak ada ilmu pemerintahan, melainkan hanya terdapat disiplin ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Sejumlah universitas di Amerika dan Inggris memiliki institusi “*department of government*” atau “*department of government and politics*” tetapi tidak mengembangkan “*science of government*” sebagai disiplin ilmu, melainkan berisi ilmu politik.

Selain itu pemerintahan sering dianggap menjadi sebuah studi dan belum menjadi disiplin ilmu. Kondisi tersebut menjadikan ilmu pemerintahan sering dianggap sebelah mata oleh disiplin ilmu yang lain. Eksistensi ilmu yang telah dijelaskan diatas terutama terkait obyek kajian ilmu pemerintahan masih mengalami kebingungan. Ilmu pemerintahan juga masih diragukan ke ilmuannya oleh ilmu sosial yang lain karena tidak memiliki teori pemerintahan dan cenderung dianggap sebagai derivasi dari ilmu politik. Menurut Syafiie (2013) bahwa Ilmu Pemerintahan memiliki beberapa hubungan dengan ilmu lain seperti ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Pertama Ilmu Pemerintahan ilmu pemerintahan merupakan cabang dari Ilmu Politik, dimana banyak negara seperti Belanda (negara-negara kontinental) memahami ilmu pemerintahan menjadi ilmu turunan dari ilmu politik. Namun pada akhirnya para akademisi seperti Van Poelje mencoba menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan ilmu yang berdiri sendiri dan banyak mengajarkan pendidikan ke pamongprajaan. Kedua, ilmu pemerintahan

dipandang sebagai cabang dari Ilmu administrasi negara. Hal tersebut dapat diketahui melalui banyak konsep dan teori ilmu pemerintahan yang menggunakan dari konsep dan teori administrasi negara. Bapak Ilmu Pemerintahan yaitu Woodrow Wilson sejatinya akan membedakan ilmu pemerintahan dari ilmu sosial lainnya, namun pada praktiknya ilmu pemerintahan sangat dekat dengan ilmu administrasi negara dan susah untuk dibedakan.

MEMAHAMI HAKEKAT ILMU POLITIK YANG MELEKAT PADA PEMERINTAH

Dalam memahami ilmu politik, maka tidak akan terlepas dari sejarah dan perkembangan ilmu politik dimasa lampau dan masa sekarang. Sebelum menjadi sebuah ilmu, politik hanya mendapatkan tempat sebagai sebuah keahlian atau seni (*art*) dalam berbagai hal terkait dengan kekuasaan. Keahlian tersebut dijelaskan sebagai upaya atau cara untuk mendapatkan kekuasaan dan cara mempertahankan kekuasaan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan posisi politik hanya menjadi sebuah kondisi praktis, dan tidak memiliki unsur keilmuan. Selain itu ada keraguan oleh para sarjana ilmu alam (eksak) terkait dalil-dalil dan teori yang dibuat oleh para pakar ilmu politik. Hal tersebut didasari oleh teori dan dalil dari ilmu politik tidak bisa bersifat universal atau dengan kata lain hanya bisa dijelaskan secara dari kasus-perkasus.

Namun sebelum masuk memahami politik sebagai sebuah ilmu penulis akan mengajak kembali pada masa awal di zaman Yunani Kuno, awal mula politik dibahas dan dituangkan dalam sebuah naskah berjudul Republik karya Plato. Dalam sejarah peradaban umat manusia sebelum zaman Yunani Kuno, banyak kota-kota kuno yang telah menjadi pusat kehidupan manusia, baik unsur sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kota tertua didunia yang kita kenal adalah Jericho (Jerusalem). Setelah itu Kairo, Babilonia, Memphis, Alexandriah, Mohenjadaro, Harappa dan beberapa kota lainnya dikawasan Mediterania yang merupakan sejarah bagi umat manusia dan menjadi suatu hal yang banyak dikaji (Ahmad Suhelmi, 2001:26).

Yunani yang menjadi sebuah pusat peradaban para pemikir besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan Herodotus pernah yang mengalami kejayaannya pada zaman Pericles, dimana *direct democracy* bisa berjalan secara baik, adil dan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Masa kejayaan demokrasi di kota

Athena pada saat itu dikenal dengan *Athenian Democratia*, dimana kejayaan tersebut didasari oleh beberapa unsur yaitu 1) pemerintahan sepenuhnya oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara menyeluruh dan dilaksanakan secara langsung, 2) mendapatkan kesamaan didepan hukum, yaitu tidak dibeda-bedakan dan hukum tegak kepada siapapun 3) memiliki unsur pluralisme, dimana rakyat berhak mendapatkan penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan serta, 4) penghargaan terhadap hak atas pemisahan, dimana wilayah pribadi dihargai dan boleh mengekspresikan kepribadian secara individual (Powell, 1988). Para filsuf tersebut menjelaskan politik menggunakan pendekatan normatif, dimana adanya politik adalah upaya untuk menciptakan kebaikan bersama. Plato menjelaskan bahwa hakekat politik yaitu menganut prinsip kebajikan (*virtue*), suatu kebijakan dapat dipahami sebagai perilaku yang menjadi moral kebaikan. Dalam mencapai suatu kebajikan maka pondasi dasarnya adalah pengetahuan, dimana orang yang mempunyai pengetahuan atau wawasan yang luas maka akan memiliki kebajikan.

Begitu juga pendapat Aristoteles terkait hakekat politik, dimana tujuan daripada politik adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang merupakan perkumpulan dari individu-individu. Dengan masyarakat yang sejahtera, maka kesejahteraan individu juga akan tercapai dengan sendirinya. Hakekat politik memiliki tujuan sama dengan kehidupan manusia yaitu agar manusia mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*) (Suseno, 1994). Tujuan utama manusia hidup adalah mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kebaikan bersama, tidak ada manusia yang ingin hidup sengsara dan menderita, hal tersebut juga dijelaskan oleh Aristoteles terkait adanya politik. Rusadi (1947) menjelaskan bahwa asal mula atau secara epistemologis kata politik berasal dari kata "Polis" yang berarti "Negara Kota" dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dari awalnya beberapa keluarga lalu menjadi beberapa kelompok dan akhirnya menjadi negara kota. Hubungan tersebut menciptakan sebuah aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan. Hoogerwert (1985) menjelaskan bahwa politik bisa dikatakan sebagai sebuah kebijaksanaan atau kebaikan, sebuah kekuatan, sebuah kekuasaan, sistem pemerintahan, konflik (baik penyebab konflik ataupun resolusi konflik) dan pembagian atau kata-kata yang serumpun.

Para sarjana sampai dengan saat ini masih banyak yang memahami politik dari perspektif normatif, dimana norma-norma adalah yang menjadi pondasi dalam menjelaskan politik. Dengan memahami kebaikan menjadi unsur utama melakukan

sesuatu, maka orang akan menjadi teratur, keadilan dengan sendirinya tercipta, dan penguasa pasti akan akan menciptakan negara yang ideal untuk kebaikan seluruh warganegara. Namun dalam perkembangannya sebagai sebuah ilmu yang harus memiliki obyek yang akan diteliti, maka ilmu politik juga harus memiliki obyek penelitian.

Obyek materia Ilmu politik yaitu negara yang sangat berkaitan dengan penjelasan ilmu politik secara kelembagaan. Pendefinisian ilmu politik menggunakan pendekatan kelembagaan (*institutionalisme*) dapat dipahami bahwa ilmu politik sebagai ilmu yang mengkaji tentang lembaga-lembaga politik (*political institutions*) atau lembaga-lembaga negara. Ilmu politik mempelajari eksistensi negara (*state*), pemerintah atau (*government*), lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga politik lainnya. Dalam mempelajari negara, ilmu politik membahas tentang asal mula terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara (misal negara kesataun atau negara serikat) dan proses-proses menjalankan negara serta mempelajari pemerintah (Isjwara:1966). Budiardjo (2002) mengatakan bahwa pendekatan kelembagaan adalah pendekatan yang tradisional, dimana negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan atau tugas pokok dan fungsi, kekuasaan formal yang memiliki legitimasi serta yuridis dari lembaga negara seperti badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Oleh karena itu pendekatan kelembagaan atau tradisional mencakup unsur legal maupun unsur institusional.

Pendekatan perilaku atau biasa disebut dengan *behaviouralisme* memiliki keyakinan bahwa teori-teori sosial harus dibangun di atas landasan dari perilaku yang dapat diamati, dan menyediakan data yang terukur dalam penelitian (Heywood, 2013). Pendekatan *behavioral* lebih suka menggunakan teknik statistik dalam mempelajari politik yang lebih memusatkan perhatian pada hipotesa yang bisa diuji secara rinci seperti variabel yang bisa diukur (meski tidak mudah untuk melakukan perhitungan dan pengukuran statistik), dan tidak terpaku pada pengetahuan yang melulu berasal dari studi tentang lembaga-lembaga politik yang bersifat formal.

Para ilmuwan politik seperti David Easton (1979) menyatakan bahwa ilmu politik dapat mengadopsi metodologi dari ilmu pengetahuan alam dan ini memunculkan perkembangbiakan studi diarea yang paling cocok untuk menggunakan metode-metode penelitian kualitatif. Metode kualiatatif tersebut dapat dijelaskan dimana seperti meneliti

perilaku memilih, perilaku para legislator, dan perilaku dari para politisi dan pelobi, serta juga meneliti perilaku masyarakat dalam memilih atau menilai kinerja dari pemerintah. Sebelumnya David Easton (1962) dalam Budiardjo (2002) menjelaskan beberapa konsep pokok dalam memahami pendekatan perilaku dari proses verifikasi data untuk menguatkan data yang telah didapat, perbedaan antara yang ideal dan dengan fakta yang terjadi, harus bersifat objektif atau bebas nilai dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran atau pendapat peneliti, bersifat sistematis dan mampu menyelesaikan sebuah masalah sehingga menjadi penelitian yang memperkaya khasanah ilmu politik.

Pada perkembangannya ilmu politik banyak menghasilkan teori-teori tentang pemilihan dan membuat banyak kalangan sangat tertarik untuk membicarakan politik. Setelah adanya pemilihan umum baik secara langsung ataupun tidak langsung banyak ilmuwan politik menemukan fenomena-fenomena baru yang berkaitan dengan pendekatan behavioural (perilaku). Perilaku pemilih adalah salah satu studi yang banyak digunakan menjelang adanya pemilu untuk mengetahui pilihan dari masyarakat dan menghasilkan data-data statistik yang banyak dijadikan sumber oleh para pasangan calon. Dengan adanya pendekatan perilaku tersebut membuat eksistensi ilmu politik banyak digemari dan sudah tidak diragukan lagi menjadi sebuah ilmu pengetahuan, karena menciptakan dalil-dalil yang sedikit banyak bisa dibuktikan dan diuji validitasnya. Lembaga-lembaga survei mulai bertebaran untuk meneliti perilaku para pemilih yang hasilnya bisa menentukan prosentase dukungan ke pasangan calon dan menentukan kepuasan kinerja terhadap pemerintah.

Teori dan konsep politik semakin bertambah kaya dengan ditelitinya perilaku aktor (*actor based*) dalam pemilu. Kajian *money politics* oleh Aspinal (2015) terkait pragmatisasi yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan pendukungnya memang sudah sangat banyak dilakukan seperti *vote buying* (pembelian suara), *pork barrel* (proyek gentong babi) dan *club goods* (pemberian barang-barang publik kepada pemilih). Studi tentang *local strongman* atau *local bossism* oleh Sidel (1999) dan oligarki oleh Winters (2011) juga memperkaya khazanah ilmu politik menjadi ilmu mapan yang berbicara tentang perebutan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan.

Setelah sedikit banyak dijabarkan terkait perkembangan ilmu politik yang menjadi sebuah ilmu dan sejajar dengan ilmu lain dengan menggunakan beberapa pendekatan, politik juga sangat melekat terhadap eksistensi pemerintah. Pemerintah sudah banyak dijelaskan bahwa dalam arti sempit yaitu badan eksekutif dan dalam arti luas mencakup

badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksistensi pemerintah merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kewenangan yang merupakan sumber dari segala kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam pandangan Thomas Hobbes, kewenangan atau otoritas politik diciptakan oleh kontrak sosial. Dalam keadaan alami, pelestarian diri setiap orang berada di bawah ancaman dan ini membuatnya rasional bagi semua. Menurut Hobbes, untuk menyetujui perjanjian sosial yang memberikan wewenang kepada penguasa untuk mendapat jaminan perlindungan mereka dan untuk mentransfer hak mereka atas kedaulatan ini baik secara individu ataupun sekelompok individu, dan otoritas politik diciptakan melalui pembentukan institusi politik.

Dalam studi Ilmu Pemerintahan setiap fenomena politik harus diperhatikan secara mendalam, karena ilmu politik merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh ilmu pemerintahan, bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan cabang dari ilmu politik. Seseorang yang akan mendapatkan kursi di pemerintahan atau menjadi pemerintah, banyak yang harus melewati fenomena dan dinamika politik. Setelah mendapatkan kekuasaan juga dalam membuat sebuah kebijakan publik tidak lepas dari unsur politik, sampai dengan tahapan dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan tidak akan lepas dari fenomena politik. Oleh sebab itu perlu diperhatikan begitu pentingnya entitas ilmu politik dalam perkembangan ilmu pemerintahan, sehingga ilmu pemerintahan jangan sampai lupa atau ingkar terhadap ilmu politik.

DISKURSUS ILMU PEMERINTAHAN

Secara umum diskursus tentang ilmu pemerintahan dapat dijelaskan dengan 2 (dua) hal. *Pertama*, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang dipengaruhi oleh warisan kolonial, dimana warisan kolonial lebih mengedepankan birokrasi dan teknokrasi dalam studinya. Ilmu pemerintahan menjadi sebuah studi yang menjadikan lulusannya sebagai birokrat dan teknokrat. Birokrasi mengajarkan unsur-unsur yang hirarkis, sentralistik dan administratif, sehingga sarjana ilmu pemerintahan diciptakan untuk menjadi orang yang ahli dalam urusan perkantoran. Warisan kolonial menerjemahkan Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pemerintahan (eksekutif), pembuatan peraturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Hal tersebut

memperlihatkan bahwa ilmu pemerintahan hanya fokus mengkaji terhadap institusi-institusi pemerintahan atau pendekatan *institutionalisme*.

Mitah Thoha (1984) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan lebih berfokus pada fungsi output daripada mutu sistem politik dengan kata lain ilmu pemerintahan mencoba memahami hasil dari apa yang telah dilakukan, sedangkan ilmu politik berfokus pada fungsi input. Dengan kata lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari *society* dan suatu sistem politik, sehingga politik bisa dikatakan lebih luas fokusnya. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan dijelaskan bahwa ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi dengan ruang lingkup begitu luas mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dan desa/kelurahan adalah menjalankan keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu hubungan antara Ilmu pemerintahan dan Ilmu politik dapat diartikan sebagai hubungan yang saling mengikat, karena pemerintah tidak bisa lepas dari unsur politik dan politik juga berkaitan dengan pemerintah secara formal.

Dengan kata lain kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah (*public policy*) dibuat dalam arena politik, tetapi hampir semua perencanaan, pelaksanaannya dan evaluasinya diselenggarakan dalam arena birokrasi pemerintahan. Musanef (1985) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan unsur kedinasan, ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang bisa mengetahui dan mencari orang yang terbaik untuk bisa menemukan pemecahan masalah (*problem solving*), ilmu yang mempelajari hubungan antara yang memerintah dan diperintah sehingga dapat menciptakan tindakan efektif dan efisien, serta ilmu pemerintahan mempelajari susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan metode untuk mencapai tujuan daripada sebuah negara.

Selanjutnya Rosenthal dalam Djopari (1992) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang kinerja secara internal maupun eksternal dari struktur dan proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum yakni diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana sebuah keputusan dipilih dan diambil secara sah dan mengikat. Menurut Brasz (1975) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya (*De Bestuurswetenschap waaronder het*

verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers).

Secara klasikal Muhadam (2014) menjelaskan bahwa Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju identifikasi diri, lepas dari rahim kekuasaan yang karena itu terasa tetap berbau ilmu politik murni. Dari sudut lain yaitu pandangan ilmu hukum mencoba menjelaskan bahwa gejala pemerintahan adalah tindakan mengelola kekuasaan secara formalistik. Kondisi ini membuat praktik pemerintahan dipandang sebagai suatu aktivitas positif dari jabatan-jabatan yang diemban termasuk kelembagaannya dalam relasi antar pemerintahan, maupun antar pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya.

Ilmu pemerintahan sering diartikan sebagai *binnenlands bestuur* oleh para sarjana Indologi yang kuliah di Universitas Leiden, Belanda. *Binnenlands bestuur* sendiri adalah bentuk pemerintahan birokrasi pada zaman Hindia Belanda, sedangkan birokrasi sendiri menurut Max Weber dalam Heywood (2014) dicirikan oleh rasionalitas, perilaku yang dipandu oleh aturan dan otoritas impersonal. Dalam bidang pemerintahan komparatif, birokrasi menunjuk pada mesin administrasi dari negara, para birokrat merupakan para pejabat negara atau para pegawai negeri yang tidak dipilih (melalui pemilihan umum). Birokrasi juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan administrasi, memberikan saran dan nasihat tentang kebijakan, menyuarakan dan memadukan kepentingan-kepentingan, serta memelihara stabilitas politik. Riggs dalam Ndraha (2003) menjelaskan bahwa birokrasi diartikan sebagai “*government by bureaus*” yaitu pemerintahan biro atau aparatur negara yang dipilih dan diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat.

Birokrasi sendiri pernah dicap sebagai pemerintah yang sebenarnya, dimana pemerintah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat tidak bisa mengontrol birokrasi. Heywood (2013) mencontohkan para pegawai negeri sipil Jepang khususnya yang masuk dalam kementerian perdagangan dan industri yang pernah begitu bergengsi, sering dipandang sebagai para politisi permanen yang menjadi otak keajaiban ekonomi Jepang pada tahun 1950 dan 1960-an. Para pegawai negeri sipil tersebut dipuji karena membangun hubungan yang erat antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar yang menyokong modal ekonomi ‘campuran’ Jepang. Model perencanaan

indikatif yang berusaha merancang dan memandu kekuatan-kekuatan pasar daripada membiarkan pasar berkuasa atau sebaliknya menundukkan pasar pada negara. Oleh sebab itu birokrasi memiliki andil yang sangat besar dan kekuasaan yang besar serta bisa mengatur sebuah negara atau lebih dikenal dengan konsep negaranisasi.

Kedua, ilmu pemerintahan yang menjadikan sarjananya sebagai pelayan pasar, dengan banyak mengambil konsep dari manajemen publik, *good governance*, *reinventing government* dan *digital government*. Pemerintahan menerapkan unsur-unsur neoliberalisme. Penjelasan terkait neoliberalisme dapat diawali pada abad ke-18, dengan timbulnya aliran liberalisme di Eropa Barat, dimana ada pandangan terhadap negara menjadi rendah. Negara dianggap sebagai suatu hal yang buruk, yang terpaksa diterima keberadaannya karena ia diperlukan. Karena itu pula ditariklah suatu garis tajam yang memisahkan suasana yang dikuasai negara dengan kehidupan sosial individu, atau dengan kata lain adanya pemisahan antara suasana kekuasaan dengan suasana kebebasan. Isjwara (1966) berpendapat bahwa negara dipandang sebagai organisasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban para warganegara dan dipersamakan dengan “penjaga malam” yang juga bertugas menjamin keamanan dan ketertiban.

Tugas negara bisa dikatakan sangat passif, dimana semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan sosial individu, maka semakin baiklah negara itu. Satu istilah yang sering menjelaskan keadaan seperti ini adalah “*that government is best which governs least*”, keadaan ini juga dikenal dengan konsep *laissez-faire*. *Laissez-faire* dalam sistem perekonomian dapat diakitkan dengan pasar bebas, dimana terdapat doktrin bahwa pemerintah tidak diinginkan campur tangannya, sistem ekonomi berdasarkan *supply and demand*.

Peran pemerintah seminimal mungkin adalah sesuatu yang diinginkan oleh liberalisme. Selanjutnya liberalisme klasik bertransformasi pada tahun 1970-an menjadi neoliberalisme, dimana tujuan utama neoliberalisme adalah untuk memutar kembali batas-batas negara. Heywood (2013) memahami bahwa neoliberalisme memiliki keyakinan bahwa kapitalisme pasar yang tidak diatur akan menghasilkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang meluas. Dalam pandangan neoliberalisme bahwa tangan kaku dari pemerintah dapat menghapus inisiatif dan menghambat usaha pemerintahan. Meskipun memiliki tujuan yang baik, negara memiliki efek merusak pada urusan manusia. Hal ini direfleksikan dalam keprihatinan Kanan Baru liberal

terhadap politik kepemilikan dan dukungannya terhadap usaha swasta daripada usaha atau nasionalisasi. Pendeknya kepemilikan oleh swasta (privat) itu memiliki sifat baik sedangkan kepemilikan oleh negara (publik) adalah buruk. Ide tersebut membentuk individualisme yang kuat, dan ide tentang negara merupakan sebuah hal yang mengganggu kepentingan individu. Eksistensi negara yang pengasuh (*nanny state*) rakyatnya dianggap melahirkan sebuah kebudayaan ketergantungan dan merusak kebebasan, yang dipahami sebagai kebebasan ekonomi atau pasar. Sebaliknya, keyakinan diletakkan pada kemandirian, tanggung jawab individu dan kewirausahaan. Ide-ide tersebut tampak dimajukan melalui proses globalisasi, yang dilihat sebagai globalisasi neoliberal. Sedangkan, pengertian globalisasi yang pertama dan paling umum adalah globalisasi sebagai pemindahan atau pertukaran yang intensif antara unit-unit yang telah dibentuk sebelumnya, baik itu politik, ekonomi atau budaya. Dengan pemahaman demikian, globalisasi menandakan proses perubahan yang berasal dari tingkat unit, terutama dalam kaitannya dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari interaksi antar unit. Globalisasi sebagai transferensi dengan demikian menyiratkan pertukaran melintasi batas-batas unit yang ada dan antara unit dan sistem, tetapi masih mengandaikan sistem ini serta unit-unit yang ditafsirkan dengan cara ini, konsep globalisasi secara ontologis bersifat individualis sementara secara logis terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan strukturalisme metodologis, karena konsep globalisasi mengacu pada perubahan yang dapat diamati pada tingkat unit serta hasil interaksi antar unit yang dapat diamati namun terkadang tidak diinginkan. Pada akhirnya, bagaimanapun, globalisasi dapat direduksi menjadi penyebab yang bekerja di tingkat unit, seperti tindakan sadar dan disengaja dari agen tertentu, agen ini dan tindakan mereka dapat diklasifikasikan dalam dimensi penyebab yang berbeda. Karenanya, menurut logika konsep ini, globalisasi berlangsung luar dalam (Jens Bartelson:2000).

Ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh neoliberal memiliki fokus studi untuk kepentingan pasar dan harus memiliki unsur layak jual. Konsep *good governance* dan *reinventing government* sering digunakan untuk memperlihatkan bawa ilmu pemerintahan mampu menjadi studi yang dapat diandalkan. Osborn (1999) jelas mengatakan bahwa Pemerintahan berorientasi kepada pasar, dimana mekanisme pasar dianggap memiliki banyak keunggulan dibanding dengan administratif. Konsep pemerintahan yang berorientasi kepada pasar sangat menghendaki adanya efisiensi dan pemutusan hirarki birokrasi. Dengan adanya pemikiran tersebut, maka investasi bisa

masuk dengan gampang untuk mendirikan bisnisnya. Efisiensi, efektifitas, dan akuntabel sangat berkaitan dengan etika aktor, dimana Carlton et, all (2014) menjelaskan etika berkaitan dengan moralitas daripada individu, dimana etika bukan saja berkenaan dengan motif atau alasan melakukan sesuatu tetapi juga berkaitan dengan tindakan. Motif dan tindakan merupakan hal yang penting karena setiap tindakan didasari oleh motif tertentu, sehingga etika dan moralitas sangat dibutuhkan. Hal tersebut menjadi sebuah kebaikan bersama jika setiap individu atau kelompok mematuhi etika yang nantinya menciptakan sebuah aturan.

Ilmu pemerintahan yang beorientasi pada pasar membuat, ilmu tersebut lupa terhadap asal-usulnya yang seharusnya lebih mengedepankan rakyat. Ilmu pemerintahan lebih sering terjebak dalam logika harus memiliki etika yang benar, sehingga mereduksi substansi dan cenderung berada diwilayah administrasi. Jelas sekali konsep *good governance* hanya berbicara tentang reformasi birokrasi yang berbasis pasar serta mengedepankan etika dan moral dan terjebak di administrasi. Adanya konsep transparansi, efisien, efektifitas, akuntabilitas dan lain sebagainya adalah konsep yang diinginkan oleh pasar. Seperti diketahui menurut David Mosse & David Lewis (2005) bahwa *good governance* adalah simbol baru dari wacana pembangunan global. Tanpa mengucapkan mantra ini yaitu konsep *good governance*, hampir tidak mungkin untuk memenuhi syarat untuk bantuan luar negeri internasional. *Good Governance* berkaitan dengan transformasi birokrasi negara yang 'disfungsional' menjadi penyedia layanan yang efisien dan transparan yang bertanggung jawab kepada publik dan tunduk pada aturan hukum. Hal ini dipuji sebagai obat baru untuk keterbelakangan dan kemiskinan oleh pejabat lembaga Bretton Woods, terutama yang berkaitan dengan Afrika, di mana birokrat parasit dan afiliasi primordial mereka terlihat menggagalkan semua upaya pembangunan (Bank Dunia 1989). Pelaksanaan program *good governance* merupakan syarat pencairan pinjaman dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Namun perwakilan dari kedua organisasi ini secara konsisten menunjukkan bahwa reformasi yang dihasilkan harus 'dimiliki' oleh pemerintah negara peminjam. Menurut pandangan mereka, persyaratan teknis untuk langkah-langkah kebijakan yang dibiayai dengan pinjaman tidak bertentangan dengan kepemilikan negara atas program-program reformasi. Adanya konsep prasyarat *good governance* untuk berkaitan dengan pembangunan sebuah menjadi sebuah dilema bagi birokrasi, dimana suatu sisi akan

tunduk kepada kepentingan pasar tetapi disisi lain pembangunan bermaksud untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat.

Hal tersebut merupakan kondisi yang terjadi terhadap eksistensi ilmu pemerintahan hari ini, dan bahkan sejak berdirinya program studi ilmu pemerintahan pada tahun 1947. Ilmu pemerintahan dipengaruhi oleh kolonialisme, kapitalisme dan neoliberalisme, sehingga ilmu pemerintahan cenderung dalam aksiologinya mendukung negara atau pasar bukan mendukung dan bekerja untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

KEMBALINYA ILMU POLITIK KE DALAM LOGIKA ILMU PEMERINTAHAN

Ilmu pemerintahan dipahami sebagai ilmu yang mempelajari pemerintah, secara aksiologis lulusan ilmu pemerintahan disiapkan untuk menjadi pemerintah. Namun pada kenyataannya lulusan ilmu pemerintahan banyak yang hanya menjadi birokrat atau teknokrat dan hanya melayani penguasa. Pendefinisian terkait lulusan ilmu pemerintahan menjadi seorang birokrat mempersempit ruang lingkupnya, seolah-olah hanya diciptakan untuk menjadi seorang administrator yang hanya bergelut dengan urusan kantor. Ilmu pemerintahan cenderung untuk anti terhadap politik, karena politik dinilai sebagai sesuatu yang kotor dan harus dihindari. Padahal, pemerintah yang menjadi fokus dari kajian ilmu pemerintahan merupakan dibentuk dan dipilih melalui proses politik.

Pemerintah dibentuk oleh politik dalam hal ini dijelaskan dimana rakyat memilih, mempercayai, memberikan mandat atau mendelegasikan suaranya ke pemerintah. Rakyat atau masyarakat sendiri dapat dipahami sebagai unsur terpenting dalam suatu negara, dimana rakyat menjadi unsur selain, wilayah, pemerintah dan pengakuan secara universal. Membawa ilmu politik kembali ke ilmu pemerintahan sebagai upaya dekolonisasi seperti halnya upaya membawa negara kembali ke kehidupan masyarakat. Membawa negara kembali dalam karya Theda Skocpol (1985) "*Bringing the state back in*", dimana dijelaskan terkait otonomi dan kapasitas dari negara. Negara adalah aktor yang *prime* (utama), sehingga dalam kehidupan masyarakat perlu kehadiran negara untuk merealisasikan cita-cita sejak berdirinya negara yang berkaitan dengan konstitusi politik.

Konsep dekolonisasi dengan membawa kembali entitas politik ke ilmu pemerintah, perlu dilihat dari sisi rakyat atau masyarakat. Telah dijelaskan diatas terkait rakyat yang memiliki andil besar dalam sistem politik, dimana rakyatlah yang memilih pemerintah. Hal tersebut yang mendasari adanya konsep kedaulatan rakyat yang berawal dari kemauan umum (*volonte genarale*) yang dicetuskan oleh Jean Jacques Rousseau. Rousseau dalam Soehino (2005) menjelaskan bahwa politik atau kekuasaan pemerintah adalah menjalankan kehendak atau kemauan umum, dimana kedaulatan itu tetap ada pada masyarakat atau keseluruhan dari pada rakyat. Tetapi bukan rakyat secara perseorangan, melainkan rakyat yang sudah berganti menjadi suatu kesatuan yang disebut masyarakat. Oleh sebab itu maka pemerintah atau penguasa harus bisa menjalankan roda kekuasaan yang sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi atau golongan. Sehingga pemerintah jangan sampai kehilangan kepercayaan dari rakyat dikarenakan tidak bisa mengatur dan mengurus rakyat, untuk itu legitimasi pemerintah harus kuat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Legitimasi sendiri menurut Max Weber dalam Heywood (2013) memiliki beberapa tipe, Pertama legitimasi tradisional atau berdasarkan adat istiadat dan tradisi-tradisi yang telah lama mapan. Pada dasarnya otoritas tradisional dianggap absah karena terus eksis sejak zaman dahulu yang telah dikeramatkan oleh sejarah karena generasi-generasi tedahulu telah menerimanya. Secara khas, ia berjalan menurut sekumpulan aturan yang konkret, dimana adat istiadat telah mapan dan tak terbantahkan. Kedua bentuk legitimasi secara karismatik, dimana bentuk otoritas ini berdasarkan pada kekuatan pribadi dari seorang pemimpin yaitu pada karismanya. Tanpa mengandalkan status, posisi sosial atau jabatan, otoritas karismatik berjalan sepenuhnya melalui kapasitas sang pemimpin untuk membuat daya tarik yang bersifat langsung dan pribadi kepada para pengikutnya sebagaimana seorang pahlawan atau santa. Ketiga bentuk legitimasi legal-rasional, adalah bentuk otoritas yang berlaku dikebanyakan negara modern. Kekuasaan dari seorang presiden, perdana menteri atau pejabat pemerintahan ditentukan oleh aturan-aturan formal-konstitusional yang membatasi apa yang boleh dilakukan oleh seorang pejabat. Keuntungan dari bentuk otoritas ini dibanding dengan bentuk tradisional dan karismatik adalah karena otoritas melekat kepada sebuah jabatan daripada pribadi maka lebih kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Dengan adanya legitimasi tersebut maka pemerintah bisa memaksimal sumberdaya untuk kebaikan dan hajat hidup orang banyak.

Entitas politik harus masuk kedalam ilmu pemerintahan sehingga mengurangi dominasi kolonialisme dan neoliberal. Dengan adanya politik yang sejatinya ada unsur rakyat dan kedaulatan rakyat maka ilmu pemerintahan bisa bertransformasi ke ilmu pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Ilmu Pemerintahan kerakyatan adalah sebuah upaya dimana pemerintah secara aksiologis bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan dan memuliakan rakyat. *Pertama* entitas politik menjelaskan konsep idealisme, dimana idealisme tersebut harus dibuat, dilaksanakan dan dijaga oleh semua pihak. Idealnya sebuah negara adalah yang bisa melaksanakan sebuah kebajikan (*virtue*). Hal tersebut yang ungkapkan oleh Plato, bahwa sebuah kebajikan akan bisa terlaksana jika pemerintah memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga bisa menciptakan dan melaksanakan sebuah cita-cita sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat. Orang yang memiliki idealisme tinggi terhadap kebaikan dan kabajikan maka akan membuah sebuah perubahan dalam kehidupan diri sendiri dan perubahan masyarakat sekitar. Idealisme yang tertuang di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, dimana keduanya adalah sebuah cita-cita dan harapan bagi rakyat Indonesia yang telah dirangkai dan dibentuk oleh para *Founding Fathers*. Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Skcopol (1085) dimana adanya konstitusi politik, yang merupakan sebuah konsep idealnya negara sejak suatu negara terbentuk.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara pemerintah ataupun rakyat untuk merealisasikan idealisme atau cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejauh ini rakyat hanya menjadi subyek bukan menjadi obyek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana rakyat harus terhadap keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Memang rakyat telah menyerahkan sebagian haknya untuk bersama-sama menginginkan sebuah *common good* (kebaikan bersama) yang oleh Shumpeter (2003) diterjemahkan kedalam sebuah demokrasi pemilihan. Namun tidak selesai sampai disitu, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara sebagai upaya *popular control* seperti yang dikatakan oleh David Beetham (2003). Sehingga salah satu bentuk aksiologi bagi Ilmu Pemerintahan adalah mencerdaskan rakyat dan memuliakan rakyat sebagai upaya untuk mengontrol pemerintah.

Kedua, unsur yang sangat penting dalam membawa kembali politik kedalam ilmu pemerintahan yakni perlu mengetahui dan memperhatikan realitas politik. Realitas atau realisme adalah kenyataan yang berarti anggapan bahwa obyek indera kita adalah real,

benda-benda ada, adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu diketahui atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme politik ada sebuah kenyataan politik yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan secara global. Kenyataan adanya perang dalam memperebutkan suatu wilayah yakni pendudukan kolonialisme di Indonesia atau bahkan imperium romawi yang menguasai banyak wilayah dan ajaran universalisme menjadi dasar pemikiran untuk menjadi kerajaan dunia. Artinya realisme politik tidak memandang bahwa itu baik atau buruk namun seperti itulah keadaannya. Sebuah realisme politik harus menjadi pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya untuk tidak mengulangi sejarah tersebut. Realisme politik tidak bisa dikatakan itu salah atau benar, dikarenakan harus melihat penyebab terjadinya keadaan tersebut. Nicollo Machiavelli (2019) menyebutkan dalam merebut sebuah kekuasaan dan mempertahankannya banyak cara yang digunakan seperti membunuh sahabat seperjuangan, mengkhianati teman, tidak memiliki moral dan sebagainya, namun cara tersebut hanya mendapatkan kekuasaan bukan kemuliaan. Sering kali memang sebuah realitas politik jauh dari unsur moralitas, tetapi itulah politik dari zaman dulu hingga sekarang bahkan kedepan akan seperti itu. Realitas tersebut tidak boleh dihindari namun harus dijalani dan dipelajari, seperti halnya adanya *money politics* dan kasus korupsi di Indonesia yang jika ditelusuri secara mendalam bahwa fenomena tersebut justru menjadi semakin jamak. Sifat alamiah manusia seperti yang dikatakan Thomas Hobbes yaitu *competitio*, *defentio* dan *gloria*, baik sebelum adanya negara bahkan setelah adanya negara. Realisme politik dalam pemerintahan juga banyak terjadi seperti partai koalisi yang meminta jabatan atas dasar dan landasan telang mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ilmu pemerintahan juga harus memasukkan realitas politik didalam studinya. Ilmu pemerintahan tidak hanya belajar tentang etika pemerintahan namun juga belajar studi yang berkaitan dengan realitas politik. Tetapi tetap dalam sebuah realitas politik, ilmu pemerintahan akan selalu memiliki prinsip dalam mendukung, memuliakan dan memperkuat rakyat kecil.

Ketiga, dalam membawa lembali politik kedalam ilmu pemerintahan haruslah berlandaskan *strong government*. Pemerintah yang kuat mengindikasikan bahwa rakyat akan dimuliakan dan diprioritaskan. Huntington dalam Lipset (2007) menjelaskan bahwa jutaan umat manusia mengorbankan nyawa dalam rangka memperjuangkan demokrasi. Perjuangan tersebut dicatat oleh Huntington dalam tiga gelombang demokrasi, artinya sebagian besar negara didunia ini menganut sistem demokrasi. Namun poin utama

teletak dalam unsur-unsur demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu pondasi dalam sistem demokrasi, namun kebebasan dalam realistiknya ada cenderung bersifat liberal. Telah dijelaskan diatas terkait hancurnya Athenian Democratia oleh Sparta, dimana kejayaan demokrasi Athena tidak bisa bertahan lama karena unsur kebebasan yang akhirnya terlampau bebas. Setiap individu, kelompok dan organisasi lainnya dibiarkan memiliki pendapat, ide dan gagasan sesuai dengan keinginannya, sehingga hal tersebut menimbulkan dan perpecahan terhadap keutuhan negara. Pemerintah haruslah menjadi aktor yang kuat dalam memerintah rakyatnya, dalam hal ini pemerintah tidak boleh kalah dengan pasar dan dengan para birokrat. Pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, sehingga rakyat yang diprioritaskan bukan pasar atau birokrasi. Pemerintah yang kuat akan membuat negara tetap utuh dan tidak ada perpecahan, namun bukan berarti pemerintah boleh otoriter ataupun totaliter sehingga harus mendapatkan *checks and balances* dari rakyat. Kuat dalam hal ini adalah pemerintahlah yang berkuasa, bukan birokrasi atau pasar, serta kuat dalam melakukan pertimbangan kebebasan yang terlampau bebas (ide dan gagasan yang semauanya sendiri) yang bisa menyebabkan konflik dan perpecahan.\

KESIMPULAN

Politik adalah unsur yang penting dalam eksistensi ilmu pemerintahan, sehingga studi-studi politik dalam ilmu pemerintahan harus dijelaskan secara ontologis, epistemologis dan sampai dengan aksiologis. Diskursus tentang ilmu pemerintahan sudah banyak dilakukan oleh para sarjana, dimana terdapat keraguan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu atau bukan, ilmu pemerintahan hanya membahas konsep dan teori administrasi sampai pada diskusi bahwa ilmu pemerintahan merupakan cabang dari ilmu politik. Penulis sendiri lebih mendukung dan membela bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang bisa berdiri sendiri meskipun banyak konsep, teori, metode dan metodologi yang masih menyerap dari ilmu lain. Ilmu pemerintahan yang khas Indonesia dan tidak ada yang lain merupakan sebuah upaya baru bagi para sarjana untuk mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu sosial.

Namun dalam perjalanan ilmu pemerintahan untuk menjadi sebuah ilmu seperti halnya ilmu sosial lain yang sudah mapan tidak berjalan lancar. Banyak kabut tebal yang menjadi ganjal bagi ilmu pemerintahan seperti adanya paham kolonialisme dan neoliberalisme yang sangat dominan mempengaruhi berkembangnya ilmu

pemerintahan. Ilmu pemerintahan terlihat sebagai ilmu yang hanya mempelajari administrasi, dan secara aksiologis lebih ke birokrasi dan *market based* dan anti terhadap politik. Sehingga upaya yang dilakukan untuk membuat terang dan mencerahkan ilmu pemerintahan adalah membawa spirit politik kedalam roh ilmu pemerintahan. Sehingga alternatif yang ditawarkan dalam membawa spirit politik kedalam ilmu pemerintahan.

Pertama, secara tegas menjalankan idealisme bangsa dan negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Karena ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang hanya ada di Indonesia, maka perlu dan penting untuk memperhatikan cita-cita atau idealisme suatu negara agar pemerintah yang menjadi aktor penting dalam pemerintahan mampu membuat komitmen untuk peduli terhadap rakyat secara keseluruhan. Hal tersebut dapat diinterpretasikan dengan merancang mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan langkah praktis dalam mengamalkannya, seperti halnya langkah utama dari proses tersebut adalah membuat perspektif ilmu pemerintahan yang tertera dalam konsep *government, governing, governability, governance* dan *governmentality*.

Kedua, realitas politik baik itu bersifat baik ataupun buruk tetap diperhatikan dan dipelajari untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan idealisme. Ilmu pemerintahan jangan sampai anti kepada ilmu politik, karena banyak unsur politik yang masuk kedalam suatu pemerintahan, dari awal seseorang mendapatkan sebuah kekuasaan untuk memerintah pasti akan melewati proses politik sampai dengan tahap membuat kebijakan dan keputusan. Politik sudah meresap kedalam pemerintahan maka secara epistemologis adalah membuat mata kuliah yang banyak mengilhami entitas ilmu politik dan kombinasi antara politik dan pemerintahan sehingga tidak membuat dikotomi yang terlampau jauh.

Ketiga menguatkan pemerintah, karena pemerintah adalah aktor yang penting yang hanya bisa tunduk kepada kedaulatan rakyat bukan kepada pasar ataupun birokrasi. Penguatan pemerintah dapat dilaksanakan menggunakan sebuah cara yaitu proses deliberatif, dimana masyarakat secara aktif diikuti sertakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan melalui dibukanya ruang-ruang politik yang membuat sebuah isu tertentu menjadi isu publik yang harus dicermati dan dikawal sejak awal. Serjana ilmu pemerintahan didorong untuk membuat ruang-ruang politik yang ada dimasyarakat agar masyarakat bisa memiliki peran aktif dan tidak takut untuk

mengemukakan pendapatnya. Sehingga secara aksiologis tugas sarjana ilmu pemerintahan menjadi pendamping masyarakat dan memberikan pencerahan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew. H (2013). *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aristoteles (2016) *Politik*, Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea. Diterjemahkan dari *Politic* (1995), New York: Oxford University Press.
- Aspinal. E dan Mada Sukmajati (eds), 2015. *Politik Uang di Indonesia, Patronasi dan Klientalisme Dalam Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov, DPP Fisipol UGM.
- Bartelson.J (2000) Three Concepts of Globalization. *International Sociology*. Vol 15(2): 180–196 SAGE (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi)
- Beetham. D (2003) *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Budiardjo, Miriam (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Djopari (1992) *Ilmu Pemerintahan dan Tata Pemerintahan*. (De Bestuurs wetenschap en Bestuurskunde) IIP Jakarta.
- Easton. David (1962) *The Current Meaning of Behavioralism in Political Science*. Dalam *Limits of Behavioralism in Political Science* ,ed. James C. Charlesworth Philadelphia: American Academy of Political Social Science.
- Eko. S (2020) Ilmu Pemerintahan: Anti pada Politik, Lupa pada Hukum dan Enggan pada Administrasi, *Jurnal Ilmu pemerintahan Semesta (Governabilitas) Volume 1 Nomor 1 Juni, STPMD “APMD” Yogyakarta*.
- Evan. B Peter, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol (1985), *Bringing The State Back In*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodnow.J Frank (1990)*Politics and Administration*. The Mac Millan Co, New York.
- Hoogerwert (1985) (RLL Tobing pent) *Politikologi (politologie)*.Jakarta: Erlangga.
- Isjwara. F (1966) *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A Bardin.
- Kartaprawira.R (1947)*Sistem Politik Indonesia*. The World Publishing Company.
- Labolo. M (2014) *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lipset. Seymour. M (2007) *Political Man*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machiavelli. Niccolo (2019) *Il Principe (sang pangeran)*, Yogyakarta: Buku Seru.
- Mosse. D And David Lewis (2005) *The Aid Effect Giving and Governing in International Development*, London: Pluto Press.
- Musanef (1985) *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha. T (2003) *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2*, Jakarta: Asdi Mahastya.
- Osborn. D (1999) *Mewirauahakan Birokrasi*, Jakarta: Teruna Grafica.
- Powell. Anton (1988) *Athens and Sparta, Construding Greek Political and Social History From 478 B.C*, Oregon: Areopagitica.
- Roode. C.C et al (2014) *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali.
- Shumpeter. A. Joseph (2003) *Capitalis, Socialism and Democracy*. London and New York : Taylor and Francis e-library.
- Sidel.J.T (1999) *Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of ‘Local Strongmen*.
- Soehino (2005) *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Libery.
- Suseno, Franz Magnis (1994) *Etika Politik*, Jakarta: Kanisius.
- Suhelmi. A (2001) *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syafiie I.N (2013) *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju.

Thoha. Miftah (1984) *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

Poelje.G.A. Van (1942) *Algemene Inleiding Tot De Bestuurkunde dalam Pengantar Ilmu Pemerintahan (177)*, YKD IIP Jakarta.

Winters, J. (2011). *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama